

## LANDRENTE DI KERESIDENAN REMBANG PADA MASA KULTUURSTELSEL

Oleh: Tri Handayani

Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro

### ABSTRACT

Landrente (*land rent*) was one of the Dutch Colonial government policies implemented during the Cultivation System (*Cultuur Stelsel*). The basis philosophy of the system is the opinion that basically land is owned by the state. Peasants have to rent from the government. In this system the farmers have to pay land rent annually to the government. Because the scarcity of money, the farmers could also pay the land rent with rice. The quantity of rental payment depended on the level of soil fertility. For this reason, rice field were classified into as two categories namely irrigated rice field and unirrigated rice field. Land rent was put into effect in every village and head village took responsible for this mechanism. This paper discusses land rent in Rembang Residency during the Cultivation Systems period. Historical method and socio-economic approach are used to answer how land rent implemented in Rembang Residency. It is also used to answer the question on whether the land rent impacted to the deterioration of economic life of the people in Rembang.

**Key Words:** *cultivation systems, land rent, subsistence economy.*

### I. PENDAHULUAN

Raffles adalah pelopor sistem perpajakan di Jawa. Ia memperkenalkan sistem sewa tanah pada tahun 1813 dengan tujuan untuk memfungsikan kepala desa sebagai wakil pemerintah dalam pemungutan penghasilan.<sup>1</sup> Raffles menginginkan penduduk dijamin untuk bekerja menurut kehendak mereka sendiri termasuk hak-hak atas hasil tanah mereka. Berdasarkan pada penelitian tentang hak-hak penduduk atas tanah yang mereka garap yang dilakukan di daerah *Vorstenlanden* (Yogyakarta dan Surakarta) dapat disimpulkan oleh Raffles, bahwa negara adalah pemilik seluruh tanah yang digarap oleh penduduk, tetapi hak milik itu dibatasi oleh hak

guna tanah oleh penduduk pribumi yang telah berlangsung bertahun-tahun. Maka dari itu, hak penggarapan atas tanah-tanah tersebut tidak boleh diganggu gugat dan penduduk dibiarkan menikmati hasilnya, sejauh penduduk memenuhi kewajibannya kepada negara. Berdasarkan persepsi inilah, pemerintah Inggris menyusun suatu sistem pajak dengan nama *Landlijk Stelsel* atau *stelsel* pertanahan. Tanah negara disewakan dengan pembayaran sewa tahunan yang disebut dengan *landrente* atau pajak tanah. Pembayarannya dalam bentuk penyerahan hasil panen padi, yang banyaknya disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah. Dengan alasan ini, maka tanah sawah yang ditanami padi dibagi dalam dua kelas, yaitu tanah

basah yang ditanami padi dan tanah ladang. Kenyataannya bentuk pembayaran sewa tanah itu dalam bentuk uang. Penarikan pajak dilakukan pada tiap desa. Sewa tanah itu diperhitungkan secara desa per desa dan pembagian hak guna penggarapan atas tanah tersebut diserahkan kepada para kepala desa, karena dialah yang bertanggung jawab atas hasil pemungutan pajak yang diperoleh dari hasil panen tanaman yang ditanam di atas tanah.<sup>2</sup> Dengan demikian, beban *landrente* per penggarapan ditentukan oleh keputusan kepala desa bersama para penggarap.

Sistem pembayaran sewa per desa ternyata mengakibatkan pemerasan kepada petani penggarap, sehingga sistem ini dirubah, yaitu penarikan sewa secara perorangan atau per keluarga petani. *Staatsblad* 1819 No.5 menyebutkan, bahwa untuk sementara sebelum dilakukan pengukuran dan penilaian kesuburannya dengan seksama, penafsiran *landrente* diatur secara per desa, dan besarnya ditentukan berdasarkan musyawarah antarkepala desa dengan para tokoh desa setempat.

Johannes van den Bosch melanjutkan kebijakan Raffles dalam pelaksanaan penarikan pajak tanah.<sup>3</sup> Prinsip-prinsip dalam *kultuurstelsel* yang berhubungan dengan masalah *landrente* menyebutkan, bahwa: 1) Penduduk yang terkena wajib tanam, oleh karena penyerahan sebagian dari tanah mereka itu tidak boleh dituntut untuk wajib kerja lagi, kecuali mereka hanya bekerja untuk menggarap tanah sawahnya sendiri; 2) Dengan penyerahan tanah tersebut penduduk dibebaskan dari *landrente*; 3) Khusus dalam hal jika pelaksanaan *kultuurstelsel* mengalami kesulitan-kesulitan, maka yang harus menjadi pegangan adalah pembebasan *landrente*, dan sejauh penduduk yang terli-

bat telah memenuhi kewajibannya dengan menanam dan memelihara tanaman gubernemen sampai dewasa, proses selanjutnya akan diatur dengan cara tersebut di atas atau dengan cara lain, yaitu sedapat mungkin dengan perjanjian terpisah.<sup>4</sup> Apabila prinsip-prinsip *kultuurstelsel* betul-betul dilaksanakan, maka penduduk tidak akan mengalami keberatan-keberatan, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan di lapangan berbeda dari aturan yang telah ditetapkan.

Seluruh jumlah tanah yang disediakan untuk penanaman paksa di Jawa hanya merupakan bagian yang relatif kecil dari seluruh tanah pertanian di Jawa.<sup>5</sup> Penerimaan pajak tanah pada tahun 1829, 1835, dan 1940 berturut-turut adalah 3.305.698 gulden, 7.679.359 gulden, dan 9.364.907 gulden.<sup>6</sup> Jumlah pajak tanah yang terus meningkat pada setiap periode bila dibandingkan dengan luas tanah pertanian untuk tanam paksa yang relatif kecil menimbulkan suatu perkiraan, bahwa bukan orang-orang yang terlibat sistem tanam paksa yang dibebaskan dari pembayaran pajak tanah tersebut, tetapi justru tanah yang disediakan untuk areal penanaman paksa yang dibebaskan dari pajak tanah. Jumlah orang yang terlibat dalam tanam paksa lebih banyak daripada luas tanah pertanian di Jawa, sehingga apabila petani-petani itu dipungut pajak tentu jumlah pendapatan pajak selalu meningkat. Sebagai contoh, bahwa pada tahun 1833 luas seluruh tanah pertanian adalah lebih kurang 964.000 *bau*, dan 6.000 di antaranya dipergunakan untuk areal tanam paksa. Jumlah itu menurun menjadi 53.000 *bau* pada tahun 1861.<sup>7</sup>

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Dengan demikian metode yang digunakan adalah metode historis, yaitu: mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber, sehingga dapat diperoleh fakta sejarah yang otentik dan kredibel. Kemudian fakta-fakta sejarah yang masih fragmentaris itu direkonstruksi dan ditulis secara sistematis menjadi sebuah tulisan sejarah.

## III. PEMBAHASAN

Ciri-ciri pokok tanam paksa adalah pemungutan pajak terhadap rakyat Indonesia dari hasil pertanian rakyat.<sup>8</sup> Pada dasarnya *landrente* diperhitungkan dari hasil panen padi per *bau*. Hal ini didasarkan atas ketentuan yang terdapat dalam keputusan Komisaris Jenderal tertanggal 4 Januari 1819 dan termuat dalam *Staatsblad* No.5 tahun 1819.<sup>9</sup>

Pemerintah Keresidenan Rembang memperoleh pendapatan daerah dari tiga macam pajak, yaitu: 1) *landrente* atau pajak-pajak tanah yang tidak ada bangunannya, 2) pajak perusahaan, dan 3) pajak perikanan atau tambak.<sup>10</sup>

Wilayah Keresidenan Rembang secara geografis kurang menguntungkan untuk ditanami padi. Hasil tanaman yang lebih besar diperoleh dari tanaman tembakau. Pada periode tanam paksa, pendapatan pemerintah daerah sebagian besar diperoleh dari hasil panen tembakau.<sup>11</sup> Panen padi yang buruk terjadi lagi pada tahun 1833 dan tahun 1834 karena curah hujan pada tahun-tahun itu berkurang. Gubernemen terpaksa memberikan bantuan benih padi kepada penduduk, karena benih padi sangat kurang. Kurangnya curah hujan menyebabkan pemerintah memutuskan untuk

menggali saluran air, sehingga areal sawah yang digarap diharapkan juga bertambah luas. Berbeda dari panen padi yang buruk, tanaman jagung justru berhasil baik, sehingga dapat untuk menutup kebutuhan pangan pokok penduduk menggantikan padi yang hasilnya buruk.<sup>12</sup>

Perluasan tanah garapan penduduk ternyata kalah cepat dengan angka pertumbuhan penduduk. Akibatnya, batas minimal yang ideal bagi pemilik tanah garapan dengan irigasi kurang dari tiga *bau*, apalagi tanah garapan dengan pengairan yang tergantung pada curah hujan. Tabel 1, 2, dan 3 (lihat lampiran) akan membahas hal tersebut.

Data pertanian pada tabel 1 menunjukkan peningkatan pemilikan rata-rata per keluarga dari tahun 1856 sampai 1857 sebanyak 0,05 *bau*. Dari tahun 1857 ke tahun 1858 meningkat lagi sebanyak 0,36 *bau*. Peningkatan pemilikan tanah garapan rata-rata per keluarga itu sangat logis, karena pada tahun 1857 luas tanah garapan bertambah 1.871,25 *bau* dan jumlah keluarga petani berkurang menjadi 1.403 keluarga. Pada tahun 1859 pemilikan tanah garapan rata-rata per keluarga turun 0,62 *bau*, dan turun lagi 0,14 pada tahun 1860. Ternyata pada tahun 1859 jumlah keluarga petani naik 7.629 keluarga, sedangkan luas tanah garapan tetap. Tahun 1860 jumlah keluarga petani naik lagi sebanyak 6.523 keluarga dan luas tanah garapan hanya bertambah 180 *bau*.

Tanah sawah yang subur seluas  $\frac{1}{4}$  sampai dengan  $\frac{1}{2}$  *jung* ( $\pm 1-2$  *bau*), menurut ukuran abad XIX cukup untuk menghidupi satu keluarga seorang petani.<sup>13</sup> Pada tabel 1 dapat diketahui luas rata-rata pemilikan tanah garapan per keluarga petani di Keresidenan Rembang antara tahun 1856 sampai

dengan 1860 yaitu 2,07 *bau*, bahkan di bawah dua *bau* pada tahun 1859 dan 1860. Kondisi pemilikan tanah lahan sawah itu masih diperberat lagi dengan kondisi geografis di Keresidenan Rembang yang mengakibatkan tanahnya tidak subur, dan kurangnya sarana pengairan, sehingga pengairan tanah persawahan mayoritas tergantung kepada curahan hujan (tabel 2 dan 3).

Kondisi luas dan persentase sawah tadah hujan di Keresidenan Rembang pada tahun 1856 sampai dengan 1860 ditunjukkan dalam tabel 3. Perbandingan rata-rata luas tanah sawah yang diairi dengan irigasi dengan luas tanah seluruhnya di Keresidenan Rembang pada tahun 1856 sampai dengan 1860 adalah 15,956 persen.

Perbandingan rata-rata luas tanah sawah yang pengairannya tergantung pada curah hujan dengan luas tanah sawah seluruhnya di Keresidenan Rembang pada tahun 1856 sampai dengan 1860 mencapai 84,944 persen.

Kondisi pengairan tanah garapan yang mayoritas mengandalkan pada curah hujan, cuaca yang tidak menentu dan penyempitan pemilikan tanah garapan mengundang kerawanan bagi pemenuhan kebutuhan hidup penduduk.

Menurut James C. Scott, petani yang subsisten mempunyai pandangan yang berbeda tentang hal mengambil risiko dibandingkan dengan para penanam modal.<sup>14</sup> Lebih lanjut dikatakan, bahwa taraf hidup petani di bagian terbesar Asia Tenggara selalu berada cukup dekat kepada tingkat minimum.<sup>15</sup>

Adanya realitas sosial tentang tingkat krisis subsistensi bagi kebanyakan petani penanam, melahirkan prinsip mendahulukan selamat di kalangan mereka, antara lain diwujudkan dalam hal pemilihan bibit dan cara-cara bertanam, dengan maksud meminimalkan ke-

mungkinan terjadinya satu bencana daripada memaksimalkan penghasilan rata-ratanya. Petani mengesampingkan pilihan-pilihan yang meskipun memberi harapan akan mendatangkan hasil bersih rata-rata yang lebih tinggi, tetapi mengandung kerugian yang besar yang dapat membahayakan subsistensinya.<sup>16</sup>

Jenis padi yang ditanam di Keresidenan Rembang ada tiga jenis pokok, yaitu *dalem*, *tengah*, dan *genjah*. Padi *dalem* memerlukan waktu 5-6 bulan dari mulai penanaman sampai panen, padi *tengah* 4-5 bulan, dan padi *genjah* 3,5 - 4,5 bulan.<sup>17</sup> Penyisihan hasil panen yang terbaik dari empat *bau* sawah dari setiap desa adalah suatu kegiatan yang sudah lama dalam peningkatan produksi.<sup>18</sup>

Kabupaten Bojonegoro pada tahun 1857 memiliki tanah sawah yang ditanami seluas 46.548 *bau*. Dari tanah sawah seluas itu sebanyak 6.484 *bau* ditanami dengan padi *genjah*.<sup>19</sup> Pada tahun 1867 di Keresidenan Rembang terdapat tanah sawah seluas 106.289,5 *bau* yang ditanami padi *dalem* dan 27.613,5 *bau* yang ditanami padi *genjah*. Jenis padi *dalem* hasilnya lebih baik dan lebih banyak, tetapi penggarapan tanahnya harus lebih hati-hati dan baik; apabila kekurangan air mudah mati atau gagal panen. Kelebihannya adalah padi atau berasnya bisa disimpan lebih lama daripada *genjah*.<sup>20</sup>

Hasil padi *genjah* pada tahun 1840 adalah 502.317 *pikul*, sehingga diputuskan *landrente* padi untuk setiap *pikul* adalah satu gulden lebih sedikit. Dengan demikian *landrente* pada tahun 1840 adalah 502.791 gulden<sup>21</sup> (lihat tabel 4 pada lampiran).

Tabel 4 memperlihatkan hasil *landrente* padi pada tahun 1840 sampai dengan 1846 berkisar antara 400.000 gulden lebih, tetapi pada tahun 1844

merosot di bawah angka 400.000 gulden. Ketersediaan sumber kurang mendukung untuk mengetahui penyebab kegagalan tersebut. Pada umumnya berkurangnya hasil *landrente* disebabkan oleh kegagalan panen atau dapat juga disebabkan oleh kepala desa menanggihkan pembayarannya. Kegagalan panen biasanya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: kurangnya pengairan, cuaca, hama penyakit tanaman, dan berkurangnya tenaga penggarap, yaitu: manusia dan binatang pembajak sawah (lihat tabel 5 pada lampiran).

Dari tabel 5 dapat diketahui, bahwa selama tahun-tahun tersebut produksi padi di Keresidenan Rembang tidak tetap. Dalam bukunya, P.J. Veth tidak mengemukakan penyebab kegagalan produksi padi tersebut, tetapi di dalam *kultuur verslag* tahun 1857 dapat diketahui, bahwa kegagalan panen padi pada tahun 1857 terjadi pada tanah sawah seluas 17.887 *bau* masing-masing 6.362 *bau* di Kabupaten Rembang, 7.829 *bau* di Kabupaten Tuban, 2.169,5 *bau* di Kabupaten Bojonegoro, dan 1.526,5 *bau* di Kabupaten Blora. Penyebab kegagalan itu adalah hujan yang turun terus menerus pada saat penyemaian, kurangnya tenaga penggarap, yaitu tenaga manusia dan hewan, pembajak serta berjangkitnya penyakit tanaman, yaitu *mentek*, *wereng*, dan *kabebeng*.<sup>22</sup> Kegagalan panen pada tahun 1867 terjadi di Kabupaten Rembang seluas 9.308,5 *bau*, Kabupaten Bojonegoro seluas 7.310 *bau*, dan Kabupaten Blora seluas 4.720,5 *bau*. Secara total kegagalan seluruhnya meliputi areal persawahan seluas 34.269 *bau*. Kegagalan panen pada tahun 1866 terjadi pada areal persawahan seluas 14.207 *bau*. Kegagalan panen pada tahun 1867 disebabkan oleh musim hujan yang datang ter-

lambat dan tidak merata. Akibatnya banyak sawah yang tidak atau terlambat ditanam. Akan tetapi, areal persawahan yang sudah terlanjur ditanam sebelum musim hujan tiba banyak yang mati sebab sebagian besar padi yang sudah cukup dewasa pada bulan Mei dan Juni diguyur air hujan yang datangnya terlambat, sehingga panen padi menjadi sangat kurang.<sup>23</sup>

Data tentang harga padi di Keresidenan Rembang pada tahun 1855 hingga 1867 dapat dilihat pada tabel 6. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui adanya peningkatan harga secara bertahap mulai tahun 1859.

Harga padi sangat tergantung dari berbagai keadaan atau faktor, misalnya besar kecilnya panen dan ekspor impor beras, hasil panen jagung dan sebagainya. Dengan demikian harga padi selalu berfluktuasi dan kadang-kadang terjadi perubahan yang tiba-tiba. Biasanya sesudah panen harga menjadi rendah kemudian naik berangsur-angsur bahkan sampai harga tertinggi dibanding dengan harga panen berikutnya. Panen padi tahun 1867 kurang baik, maka harga padi relatif tinggi dibanding tahun 1866. Harga padi dapat terkendali, karena pada saat yang sama panen jagung cukup baik. Pada umumnya penduduk cenderung segera menjual padinya sesudah panen tanpa menunggu agar harga menjadi cukup tinggi atau normal kembali.<sup>24</sup> Petani penanam padi ada juga yang menjual padinya dalam bentuk gabah. Produksi gabah di Keresidenan Rembang dapat dilihat pada tabel 7.

Data pada tabel 7 dan tabel 5 dapat menunjukkan suatu perbandingan antara jumlah panen padi dengan gabah, yaitu lebih kurang dua berbanding satu. Di Keresidenan Rembang tidak ada perusahaan penggilingan padi. Orang Jawa menguliti padi dengan cara tradisional,

yaitu dengan cara menumbuk padi dengan mempergunakan *alu* dan *lumpang*. Sedikit sekali orang Jawa yang berprofesi sebagai pembeli padi kemudian menumbuknya menjadi beras. Bagaimanapun juga harga padi dengan harga gabah berbeda jauh.<sup>25</sup>

Peraturan tentang tanam paksa yang berhubungan dengan masalah *landrente* menetapkan, bahwa *landrente* dipungut dari hasil panen padi. Dengan demikian untuk mengetahui besarnya *landrente* yang akan dipungut dari penduduk diperlukan data tentang produksi padi. Dari data-data pada tabel-tabel terlampir dapat digunakan untuk menelusuri dampak *landrente* terhadap penduduk di Keresidenan Rembang.

Selama periode 1856 sampai dengan 1860, setiap tahun luas tanah garapan penduduk di Keresidenan Rembang mengalami perluasan (lihat tabel 2). Meskipun demikian, perluasan areal tanah sawah garapan itu belum menjamin produksi selalu tinggi. Bahkan pemilikan tanah garapan per keluarga petani pun mengalami penyempitan sehubungan dengan peningkatan jumlah penduduk.

Persentase *landrente* dari nilai padi di Keresidenan Rembang pada tahun 1856 sampai dengan 1860 dapat dilihat pada tabel 8 (lihat lampiran).

Pada tahun 1858 sampai dengan 1860 besarnya *landrente* yang dibebankan kepada petani sebagai berikut. Pada tahun 1858 nilai padi lebih tinggi daripada nilai padi pada tahun 1859, tetapi nilai *landrente* pada tahun 1858 lebih rendah daripada nilai *landrente* pada tahun 1859. Demikian juga dengan nilai padi pada tahun 1860 lebih tinggi daripada nilai padi tahun 1858 dan 1859, tetapi nilai *landrente* pada tahun 1860 lebih rendah daripada nilai *landrente* tahun 1858 dan 1859. *Landrente*

per keluarga petani di Keresidenan Rembang dapat dilihat pada tabel 9 dan 10 (lihat lampiran).

Tabel 9 dan 10 membantu kita untuk mengetahui *landrente* yang telah dibayarkan oleh penduduk Keresidenan Rembang dari tahun 1856 sampai dengan 1860. Rata-rata petani di Keresidenan Rembang membayar sebanyak 19 persen dari seluruh nilai padi yang mereka peroleh. Dengan demikian per kepala keluarga rata-rata membayar senilai tujuh gulden kurang sedikit. Tabel 9 membantu kita mengetahui intensitas *landrente* bagi petani di Keresidenan Rembang.

Jumlah jiwa seluruhnya yang tercantum dalam tabel 11 (lihat lampiran) adalah jumlah keseluruhan dari penduduk di semua kabupaten. Jumlah keseluruhan keluarga petani tidak diketahui, sehingga penghitungan intensitas *landrente* mempergunakan jumlah keseluruhan jiwa yang ada. Pada tabel tersebut kita ketahui, bahwa:

- 1) *Landrente* keseluruhan adalah 505.055,43 gulden.
- 2) Produksi keseluruhan adalah 963.842 *pikul*.
- 3) Harga rata-rata padi adalah 2,55 gulden per *pikul*.
- 4) Nilai harga keseluruhan adalah  $963.842 \times 2,55 \text{ gulden} = 2.456.797,10 \text{ gulden}$ .
- 5) Hasil bersih  $2.457.797,10 - 505.055,43 = 1.952.741,67 \text{ gulden}$ .
- 6) Hasil bersih per keluarga petani  $1.952.741,67 \text{ gulden} : 71.986 \text{ petani} = 27,13 \text{ gulden}$ .
- 7) Hasil bersih sebesar itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga petani yang memang sudah hidup mendekati titik rawan subsisten walaupun mereka tidak dipungut *landrente*. Sebagai contoh kita perhitungkan pemenuhan kebu-

tuhan makan keluarga petani di Keresidenan Rembang pada tahun 1856 yang hasil panen padinya sudah dipungut pajak.

Diketahui:

- 1) 1 *pikul* = 61,76 kilogram
- 2) Harga 1 *pikul* padi pada tahun 1856 rata-rata 2,55 gulden
- 3) Hasil bersih padi per keluarga pada tahun 1856 senilai 27,13 gulden
- 4) 1 ons padi bila ditumbuk menghasilkan 0,8 ons beras (susut 20 persen).<sup>26</sup>
- 5) Jadi, 617,6 ons padi menghasilkan 494,08 ons beras.
- 6) Tiap orang dewasa sekali makan memerlukan 1 ons beras atau 3 ons beras sehari.

Proses Penghitungan:

- 1) 27,13 gulden : 2,55 gulden = 10,64 *pikul* padi.
- 2) 10,64 *pikul* padi = 657,13 Kg padi.
- 3) 657,13 kilogram padi = 6571,3 ons padi.
- 4) 6.571,3 ons X 20 persen (penyusutan) = 1.314,26 ons kulit ari.
- 5) 6.571,3 ons - 1.314,26 ons = 5.257,06 ons beras.

a. Apabila setiap hari tiap orang membutuhkan beras 3 ons beras.<sup>27</sup>

Pengambilan contoh kebutuhan makan 1 ons sekali makan ini dihitung menurut kebutuhan rata-rata yang lazim di Indonesia saat ini, yang berasal dari 365 hari X 3 ons = 1.095 ons.

b. Berarti hasil 657,13 kilogram padi itu dapat memenuhi kebutuhan pangan kira-kira 5 orang, yang berasal dari 5.257,06 ons : 1.095 ons = 4,80  $\approx$  5 orang.

Dari proses penghitungan ini dapat diketahui, bahwa sisa hasil panen padi yang telah dipotong *landrente* itu tidak

dapat menghidupi keluarga petani secara sehat, karena petani pun membutuhkan papan, sandang, dan kesehatan, serta kehidupan sosial di dalam masyarakatnya. James C. Scott berpendapat tentang kehidupan sosial petani, bahwa petani bertindak atas dasar perkiraan, bahwa peta sosialnya lebih kurang adalah tepat, bahwa pengertiannya mengenai struktur dan tuntutan-tuntutan moral sesuai dengan kesadaran tentang kewajiban yang terdapat pada orang-orang lain.<sup>26</sup>

James C. Scott juga mengutarakan, bahwa kita dapat menyelami faham petani tentang keadilan sosial dengan dua prinsip moral yang tampaknya sudah menyatu di dalam pola-pola sosial dan perintah-perintah yang berlaku di dalam kehidupan petani, yaitu norma resiprositas yang berlaku atau perimbangan pertukaran dan hak atas subsistensi yang pada hakikatnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan minimal yang harus dipenuhi bagi anggota-anggota komunitas di dalam rangka resiprositas itu. Petani memiliki prinsip moral yang sederhana, bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya, setidaknya tidak merugikannya.<sup>27</sup> Tingkat krisis subsistensi belum berarti keluarga petani yang hasil panennya di bawah tingkat itu secara otomatis mati kelaparan, karena mereka dapat beralih pada hasil panen lain sebagai pengganti beras, seperti umbi, jagung, dan lain-lain.<sup>28</sup> Demikian pula dengan petani di Keresidenan Rembang yang memakan jagung sebagai pengganti beras.<sup>29</sup> Tabel 4 menunjukkan, bahwa secara keseluruhan beban *landrente* di Keresidenan Rembang relatif lebih tinggi sedikit di atas Keresidenan Jepara, tetapi di bawah Keresidenan Pekalongan, dan jauh di bawah Keresidenan Semarang dan

Tegal. Bagaimanapun juga kebijakan perekonomian terutama dalam pemungutan pajak, di setiap keresidenan berbeda-beda. Hasil panen padi juga merupakan penyebab dari perbedaan pajak

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penarikan *landrente* di Keresidenan Rembang memberatkan petani. Petani pada periode itu setiap musim selalu menghadapi kasus yang serupa, karena pengetahuan bercocok tanam yang masih tradisional, cuaca, hama tanaman, dan ide-ide yang terbatas, yang dapat diketahui dari kehidupan yang statis. Kondisi geografis wilayah merupakan satu penyebab terpenting, sehingga seringkali petani mengalami kegagalan panen.

Kehidupan sulit yang melilit petani di Keresidenan Rembang ini tidak menyebabkan keluarga petani menjadi mati kelaparan, karena kehidupan sulit yang mereka alami bertahun-tahun telah menjadikan moral petani berpola *nrima*, atau menerima keadaan selama kerawanan subsistensi itu tidak mengancam kehidupan mereka. Bagi para petani asal mereka masih dapat makan tidak menjadi masalah.

#### CATATAN

<sup>1</sup>Anne Booth, *et al.*, ed., *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm.123.

<sup>2</sup>*Encyclopaedi voor Nederlandsche-Indie (ENI)*, 1917, hlm.234; Lihat juga Booth, *et al.*, ed., *loc. cit.*

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

<sup>4</sup>*ENI*, 1918, hlm.548.

<sup>5</sup>Sartono Kartodirdjo, *et al.*, ed., *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Depdikbud, 1975), hlm.73.

<sup>6</sup>G. Gonggrijp, *Schets Ener Economische Geschiedenis van Nederlands-Indie*, (Haarlem: De Erven F. Bohn, 1928); baca juga Kartodirdjo, *et al.*, ed., *op. cit.*, hlm.75.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.76.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.73.

<sup>9</sup>"Missive Direktur Tanaman tertanggal 9 Juni 1849"; "Verbaal 28 April 1865/W6 Kabinet", *ARADH*, dalam Agustinus Supriyono, "Krisis Subsistensi di Karesidenan Semarang (Kasus Kelaparan di Afdeling Demak dan Grobogan Tahun 1849/1850)" Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1987, hlm.117.

<sup>10</sup>*Algemeen Verlag van de Residentie Rembang (AVRR)* 46.No.38<sup>11</sup>, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

<sup>11</sup>*AVRR* 34.No.2 ANRI.

<sup>12</sup>*AVRR* 34.No.2 ANRI.

<sup>13</sup>Djoko Suryo, "Social and Economic Life in Rural Semarang under Colonial Rule in Nineteenth Century", melalui Supriyono, *op. cit.*, hlm. 60.

<sup>14</sup>James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani*. Terjemahan Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm.23.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.25.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>17</sup>Hiroyosi Kano, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang* (Jakarta: Yayasan Obor, 1986), hlm. 68; Lihat juga *Kultuur Verslag* 1857. No.162, ANRI.

<sup>18</sup>*Kultuur Verslag* 1857 No.1627, ANRI.

<sup>19</sup>*Ibid..*

<sup>20</sup>*Ibid..*

<sup>21</sup>*AVRR* 40 No. 2. ANRI.

<sup>22</sup>*Kultuur Verslag* 1857 No.1627, ANRI.

<sup>23</sup>*Ibid..*

<sup>24</sup>*Kultuur Verslag* 1857 dan 1867, No.1627, ANRI.

<sup>25</sup>Lihat tabel 6 dan 7; Lihat juga *Kultuur Verslag* 1867 No.1627, ANRI.

<sup>26</sup>Mengenai penyusutan berat padi menjadi beras pada umumnya adalah 1 berbanding 5, yaitu: 1 beras 5 kulit ari atau susut 1:5 atau 20 persen.

<sup>27</sup>Para ahli geografis berkebangsaan Perancis mengatakan, bahwa orang-orang Indocina tiap orang dewasa memerlukan minimal 300 kilogram padi per tahun; pernyataan ini periksa Scott, *op. cit.*, hlm. 253.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 253-254.

<sup>29</sup>*Kultuur Verslag* 1857 dan 1867 No.1627, ANRI.

<sup>30</sup>*Ibid..*

## LAMPIRAN

**Tabel 1. Data Pemilikan Tanah Garapan Rata-rata per Keluarga Petani di Keresidenan Rembang Tahun 1856-1860**

Tahun	Jumlah Keluarga Petani	Luas Tanah Garapan (dalam <i>bau</i> )	Rata-Rata per Keluarga (dalam <i>bau</i> )
1856	71.986	150.357,75	2,09
1857	70.583	152.229,00	2,14
1858	74.011	153.563,00	2,50
1859	81.640	153.563,00	1,88
1861	88.163	153.743,00	1,74
Rata-rata	77.276	152.691,15	2,07

Sumber: P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlandsch-Indie Bewert naar de Jongste en Bette Berigten* (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1869), hlm. 27.

**Tabel 2. Data Luas Tanah dan Persentase Sawah Irigasi di Keresidenan Rembang Tahun 1856–1860**

Tahun	Sawah Irigasi (dalam <i>bau</i> )	Persentase Sawah Irigasi
1856	21.025	13,98
1857	21.961,5	± 14,43
1858	23.479,5	Hampir 15,29
1859	24.317,5	± 15,83
1860	24.218	± 15,75
Rata-rata	23.000,30	15,06

Sumber: P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlansch-Indie Bewert naar de Jongste en Bette Berigten* (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1869), hlm.27-28.

**Tabel 3. Data Luas Tanah dan Persentase Sawah Tadah Hujan di Keresidenan Rembang Tahun 1856–1860**

Tahun	Sawah Irigasi (dalam <i>bau</i> )	Persentase Sawah Irigasi
1856	129.332,75	± 86,02
1857	130.267,50	± 85,57
1858	130.083,50	± 84,71
1859	130.245,50	Hampir 84,17
1860	129.525,50	± 84,25
Rata-rata	129.690,85	84,94

Sumber: P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlansch-Indie Bewert naar de Jongste en Bette Berigten* (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1869), hlm.27-28.

**Tabel 4. Landrente di Keresidenan Rembang Tahun 1840– 1846**

Tahun	Besarnya Landrente (dalam gulden)
1840	502.791
1842	457.482,60
1844	448.750,10
1845	301.190,10
1846	479.135,10
Rata-rata	490.880,30

Sumber: AVRR.40.No.2, ANRI dan AVRR.46.No.38<sup>II</sup>

Tabel 5. Produksi Padi di Keresidenan Rembang Tahun 1854–1867

Tahun	Seluruh Panen (dalam pikul)	Panen per <i>Bau</i> (dalam pikul)	Panen per Keluarga (dalam pikul)
1854	922.760	-	-
1855	898.139	-	-
1856	963.842	7,657	13,39
1857	998.990	7,705	14,153
1858	1.107.203	8,38	14,96
1859	768.171,5	5,832	9,41
1860	1.244.633	9,315	14,11
1866	1.294.839	-	-
1867	911.867	6,81	-
Rata-rata	1.012.271,61	7,62	13,20

Sumber: P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlansch-Indie Bewert naar de Jongste en Bette Berigten*. (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1869), hlm.29-30.

Tabel 6. Harga Padi di Keresidenan Rembang Tahun 1856-1860

Tahun	Harga Seluruhnya (dalam gulden)	Harga Per <i>Pikul</i> (dalam gulden)	Harga Rata-rata (dalam gulden)
1855	-	1,85 – 3,36	2,61
1856	2.824.057,06	2,01 – 3,85	2,93
1857	2.322.651,75	1,80 – 2,58	2,19
1858	3.083.715,016	1,985 – 3,58	2,79
1859	2.234.379,065	2,18 – 3,64	2,91
1860	3.609.435,70	2,02 – 3,78	2,90
1864	-	3,28 – 5,22	4,25
1865	-	2,50 – 6,50	4,50
1866	6.254.072,37	2,75 – 6,90	4,83
1867	6.082.152,89	5,44 – 7,90	6,67
Rata-rata	3.772.923,41	2,58 – 4,73	3,66

Sumber: *Kultuur Verslag* 1857 dan 1867, No.1627, ANRI; P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlansch-Indie Bewert naar de Jongste en Bette Berigten*. (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1869). hlm. 29-30.

**Tabel 7. Produksi Gabah di Keresidenan Rembang Tahun 1856–1860**

Tahun	Seluruh Panen	Panen Per <i>Bau</i>	Harga Per <i>Pikul</i>
1856	520.474,68	7,23	5,425 gulden
1857	539.454,60	7,642	4,305 gulden
1858	597.889,62	8,08	5,16 gulden
1859	414.812,61	5,08	5,40 gulden
1860	672.101,52	7,623	5,40 gulden
Rata-rata	548.101,52	7,13	5,14 gulden

Sumber: P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlansch-Indie Bewert naar de Jongste en Bette Berigten* (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1869), hal. 29-30.

**Tabel 8. Nilai *Landrente* di Keresidenan Rembang Tahun 1856–1860**

	Nilai Padi (gulden)	<i>Landrente</i> (gulden)	Persentase <i>Landrente</i> dari Nilai Padi
1856	2.824.057,06	505.055,355	17,87
1857	2.322.651,75	498.193,855	21,45
1858	3.083.560,355	548.126,20	17,78
1859	2.235.379,065	554.023,44	24,78
1860	3.609.435,70	529.222,82	14,66
Rata-rata	2.815.016,79	526.924,33	19,31

Sumber: P.J. Veth, 1869. *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlansch-Indie Bewert naar de Jongste en Bette Berigten* (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1869), hlm. 29-30.

**Tabel 9. Nilai *Landrente* per Keluarga Petani di Keresidenan Rembang Tahun 1856–1860**

Tahun	Nilai Padi (dalam gulden)	<i>Landrente</i> (dalam gulden)	Persentase <i>Landrente</i> dari Nilai Padi
1856	39,2327	7,016	17,88
1857	32,9057	7,058	21,45
1858	41,6636	7,406	17,78
1859	27,3831	6,786	24,7817
1860	40,9190	6,002	14,668
Rata-rata	36,42	6,85	19,31

Sumber: P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlansch-Indie Bewert naar de Jongste en Bette Berigten* (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1869), hlm. 29-30.

Tabel 10. Nilai *Landrente* per *Bau* Tanah Garapan yang Digarap Petani di Keresidenan Rembang Tahun 1856–1860

Tahun	Nilai Padi (dalam gulden)	<i>Landrente</i> (dalam gulden)	Persentase <i>Landrente</i> dari Nilai Padi
1856	22,4350	4,013	17,887
1857	17,9141	3,842	21,4468
1858	23,3383	4,148	17,7734
1859	16,9711	3,207	18,8968
1860	27,0135	3,96	14,6593
Rata-rata	21,53	3,83	18,13

Sumber: P.J. Veth, *Aardrijkskundig en Statistisch Woorden Boek van Nederlansch-Indie Bewert naar de Jongste en Bette Berigten* (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1869), hlm.29-30.

Tabel 11. Nilai *Landrente* di Keresidenan Rembang Tahun 1856

Keterangan	Rembang	Tuban	Bojonegoro	Blora	Total
Jumlah jiwa seluruhnya	111.985	180.250	177.931	95.266	609.432
Jumlah keluarga petani	15.166	19.490	26.145	11.185	71.986
Sawah penduduk ( <i>bau</i> )	25.227,5	31.788	47.149	21.764	125.849
Hasil seluruhnya ( <i>pikul</i> )	-	188.384	505.028	102.874	963.842
Hasil Per Bau ( <i>pikul</i> )	-	5,93	10,73	4,73	7,66
<i>Landrente</i> (gulden)	-	87.004,1	?	112.397	505.055,43
Harga Padi Tertinggi/ Terendah	-	6 / 2,117	5,57 / 1,114	4,70 / 2,110	3,102 / 2,0015

Sumber: *Kultuurverslag* 1856. No.1627, ANRI.

Tabel 12. Perbandingan *Landrente* per Keluarga Petani antara Keresidenan Rembang, Semarang, Tegal, Pekalongan, dan Jepara Tahun 1840 – 1849 (dalam gulden)

Tahun	Rembang	Semarang	Tegal	Pekalongan	Jepara
1840	8,17	9,34	11,52	8,72	6,34
1841	8,50	9,69	12,36	8,55	6,11
1842	9,28	9,44	11,36	8,27	6,91
1843	9,00	9,86	11,41	8,27	6,92
1844	6,00	9,60	10,09	8,43	7,37
1845	9,90	10,52	10,79	8,61	8,08
1846	7,86	9,86	10,99	8,83	7,02
1847	7,20	9,19	12,94	8,56	7,39
1848	8,68	10,02	14,00	8,79	8,54
1849	7,00	7,63	10,15	8,82	7,98
Rata-rata	8,16	9,52	11,56	8,59	7,27

Sumber : *Kultuur Verslag* Tahun 1840–1849 dalam Agustinus Supriyono, “Krisis Subsistensi di Keresidenan Rembang Kasus Kelaparan di Afdeling Demak dan Grobogan Tahun 1849/1850”. Tesis Program Pascasarjana di Universitas Indonesia, 1987, hlm.120.